

**PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT
DI DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI**

Irsa Ayu Veronika¹, Muh.Rizal S²

¹Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

²Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Email: irsaayu25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola kawasan pesisir dan laut di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai; (2) Relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sintai Timur Kabupaten Sinjai. (3) Dampak pengelolaan kawasan pesisir dan laut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dianalisa dan dituliskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan individu sebanyak 14 (empat belas) orang informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya pemerintah dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut pada umumnya masih memiliki kesadaran publik yang masih rendah. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, kurang banyak menyadari wewenang dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan pesisir dan laut; (2) Relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut terdapat hubungan yang kurang signifikan dan berpengaruh terhadap pengelolaan kawasan pesisir dan laut; (3) Dampak pengelolaan kawasan pesisir dan laut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir masih rendah karena kurangnya upaya pemerintah dalam pengelolaan kawasan pesisir, terutama terkait belum adanya sanksi yang tegas terhadap pihak- pihak yang mencemari lingkungan dalam hal ini tambang pasir yang terus beroperasi tanpa adanya surat izin dan tidak stabilnya harga pasar perikanan serta kurangnya tingkat pendidikan sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir tergolong rendah.

Kata kunci: Pengelolaan, Kawasan, Pesisir, dan Laut

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai konsekuensinya, isu pengembangan potensi sumber daya di wilayah pesisir menjadi isu sentral agar sumber daya yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, wilayah pesisir memiliki arti strategis karena daerah tersebut merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang mempunyai potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Secara garis besar, permasalahan wilayah pesisir mencakup aspek sosial- ekonomi dan lingkungan. Dari aspek sosial-ekonomi, data yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, sebesar 32,4%. Kemiskinan nelayan pada umumnya disebabkan beberapa faktor, antara lain: pendidikan yang rendah, peran lembaga ekonomi yang masih belum optimal memberdayakan nelayan, kebiasaan nelayan yang

kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang, kepemilikan modal, serta teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional. (Suryani, 2019)

Dari aspek lingkungan, kerusakan wilayah pesisir dan ekosistem baik akibat dari proses alam maupun dampak aktivitas manusia semakin meluas. LIPI menunjukkan bahwa terumbu karang Indonesia yang oleh para ahli disebut sebagai jantung amazon of the sea ternyata hanya 7% yang kualitasnya sangat baik, dan hampir 30% dalam kondisi rusak. Selain itu, beberapa aktivitas perekonomian utama yang menimbulkan persoalan dalam pengelolaan kawasan pesisir antara lain: perkapalan dan transportasi laut (tumpahan minyak, limbah padat, dan kecelakaan); pengilangan minyak dan gas (pembongkaran bahan pencemar dan konversi kawasan pesisir); perikanan (pencemaran pesisir dan over fishing); budidaya perairan (konservasi hutan); penambangan pasir dan terumbu karang; serta industri (reklamasi dan pengerukan tanah), dan pariwisata (pembangunan infrastruktur, pencemaran air, dan sampah). (Suryani, 2019)

Pada era reformasi daerah perlindungan laut (DPL) banyak terbentuk dengan berbasis masyarakat dan sudah ditetapkan UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan dalam pasal 7 masyarakat memiliki kesempatan seluas- luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sebagai pengembangan suatu bentuk pengelolaan pesisir terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama (subyek) dalam pemanfaatan lahan mangrove sebagai areal pertambakan secara berkelanjutan; menumbuhkan dan mengembalikan tanggung jawab kepada masyarakat dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di lingkungan mereka. (Witomo, 2019)

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan dengan wilayah pesisir, Kabupaten Sinjai memiliki sembilan pulau kecil dengan sebutan pulau sembilan, dan memiliki garis pantai sepanjang 31 km. 17 yang terdapat di daratan dan 14 yang terdapat di pulau pulau. Seiring dengan tingginya aktivitas di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai yang meliputi kegiatan manusia seperti: pelabuhan, pemukiman, pertambakan, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan juga penambangan pasir ini dapat menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya alam pesisir seperti degradasi ekosistem, abrasi, akresi, pembuangan limbah ke laut dan sebagainya. (Fauzi & Rauf, 2021) Ketidaksihinggaan fungsi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Sinjai Timur yang tidak sesuai dengan fungsi kawasannya sehingga menurunkan fungsi konservasi lingkungan pesisir laut. Misalnya kegiatan pertambakan yang mereklamasi hutan mangrove secara tidak terkendali, seringkali telah meningkatkan proses abrasi pantai, disamping rusaknya ekosistem mangrove sebagai tempat bergantung bagi sebagian besar siklus biota laut; Kegiatan pertambangan dan industri yang merusak ekosistem kawasan konservasi hutan mangrove di wilayah perairan dan disekitarnya berupa dampak pencemaran dan sedimentasi limbah.

Kurangnya keterpaduan pengembangan antar wilayah daratan dan pesisir laut yang sekarang ini belum ada rencana pengembangan yang terpadu antar wilayah daratan dan pesisir laut. Rencana tata ruang dan rencana pembangunan lain yang ada, masih berorientasi pada pengembangan di wilayah darat. Sistem perkotaan, prasarana, dan pusat-pusat kegiatan dirancang untuk pertumbuhan sistem kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang bertumpu pada penggunaan bahan baku dari sumberdaya alam wilayah daratan. Belum ada keterkaitan fungsional antar sistem kegiatan produksi di wilayah laut dengan sistem pemasaran dan pengolahan di wilayah daratnya.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai berupaya melakukan pemulihan wilayah pesisir. Saat ini kawasan pantai menjadi kotor dan banyak nelayan yang menangkap ikan dengan bom. Upaya pemulihan terus dilakukan, anggaran untuk pemulihan dikucurkan secara bertahap setiap tahunnya, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun bantuan dari dunia usaha. Demikian juga dari segi regulasi revisi Perda RTRW Sinjai sudah mulai dilakukan oleh DPRD. Kawasan pesisir Sinjai Timur tetap menjadi kawasan konservasi dan tempat dilakukannya pelestarian hutan mangrove.

Ketika pembangunan tidak memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam, maka akan memberikan tekanan lebih kepada ekosistem pesisir dan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang nantinya implikasinya akan berdampak kepada manusia itu sendiri karena banyak manusia yang memanfaatkan ekosistem pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak pembangunan di wilayah pesisir sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup manusia seperti pelaksanaan kegiatan reklamasi. Disisi lain, jika tidak memperhatikan aspek keseimbangan pembangunan berwawasan lingkungan maka akan menyebabkan degradasi lingkungan dan membawa dampak perubahan sosial ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ternyata masih terdapat berbagai permasalahan di sekitar kawasan pesisir dan laut di Desa Tongge-Tongke, terutama dari aspek lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan karena adanya pencemaran dapat berdampak pada tidak optimalnya manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Ada ketidakharmonisan antara sistem ekologi dan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan pembangunan di kawasan tersebut tidak dapat berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pemerintah daerah dibutuhkan dalam mengelola kawasan pesisir dan laut serta peran masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut di Desa Tongke- Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai".

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yang bersifat deskriptif, koentjaraningrat mengatakan bahwa pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau adanya frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa, mungkin belum, tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1993)

Satu hal yang perlu dikemukakan adalah bahwa paradigma penelitian kualitatif tidak hanya dibangun di atas landasan aliran filosofis fenomenologi. Namun juga dikonstruksi dan bertumpu pada aliran interaksionisme simbolik dan etnometodologi. Pada kenyataannya, aliran-aliran tersebut berbeda satu sama lain meskipun terkait pada satu kutub pandang yang memandang kodrat manusia sebagai subjek dan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan sistem makna yang dianutnya (Ahmadin, 2022). Berlandaskan dari tema yang diangkat dalam penelitian ini, serta melihat latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka dalam mengungkapkan masalah yang ada, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif dipilih sebagai metode penelitian.

Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran dari suatu gejala, penelitian yang bersifat menerangkan bertujuan mencari sebab-musabab dari suatu gejala.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan semua hasil dan informasi yang didapatkan dalam penelitian, peneliti akan berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berisi kutipan-kutipan data terkait, Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (Moleong, 2010).

Pembahasan

Setting Penelitian

Sinjai sebagai salah satu daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia. Kabupaten Sinjai memiliki 9 (sembilan) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bulupoddo, Tellulimpoe, Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, dan Pulau Sembilan. Wilayah kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Borong, dan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut maka pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, Kecamatan yang memiliki dataran yang cukup luas adalah Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Utara dan Pulau Sembilan. Dataran yang memiliki sumber daya air yang cukup dimanfaatkan masyarakat sebagai areal persawahan. Ketinggian air laut dari permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai, bervariasi dari 0-1.000 meter di atas permukaan laut (MDPL). (Tongke-togke, n.d.)

Kabupaten Sinjai memiliki nilai histories tersendiri, watak dan karakter masyarakat tercermin dari sistem pemerintahan demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunitas politik diantar kerjaan-kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan yaitu; Sipakatau(saling menghargai), menjunjung tinggi nilai-nilai konsep Sirui Menre' Tessirui No' (saling menarik keatas, pantang saling menarik kebawah, serta malillu sipakainge (bila khilaf saling mengingatkan). (Tongke-togke, n.d.) Secara Historis Tahun 1920-an Balang Dg Maketti adalah seorang yang pertama membangun Kampung dan mendirikan saoraja di Cempae, beliau merupakan salah seorang keturunan Minahan Dg Sutte, dia bersaudara sepupu dengan Arung Baringeng Mapa-pasang Dg Patappu, beliau juga yang pertama membuka lahan pertambakan di Cempae. Kata Tongke-Tongke kata Dasarnya adalah "Toke" Kata toke dipakai untuk panggilan pedagang Asal China yang tinggal di Cempae kerana terkenalnya Kampung Cempae sebagi tempat Singgahnya para toke maka orang sekitar lambat laun menyebut kampung Toke menjadi "Tongke-Tongke" yang tidak hanya dihuni warga asal China akan tetapi juga Suku Bugis. Karena letak geografis dan kondisi alamnya yang strategis sehingga tentara Jepang menjadikan Tongke-Tongke menjadi basis pertahanan terutama di daerah Bentengge oleh tentara Jepang menjadikan pos pertahanan dan membentuk tentara HEIHO, kekalahan Jepang terhadap sekutu sehingga mengungsi ke manipi.(Tongke-togke, n.d.)

Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk bersamaan dengan pendaratan tentara dari Jawa di Cempae yang kemudian tinggal di Bentengge tentara Jawa tersebut hanya beberapa bulan tinggal

di Bentengnge kemudian melanjutkan perjalanan ke Bone, Wajo dan Luwu. Tahun 1955-1959 terjadi pemberontakan DI/TII yang dipimpin Bang Jumali selama kurang lebih empat tahun masyarakat di intimidasi, rumah penduduk banyak yang dibakar, sebahagian masyarakat mengungsi ke daerah yang lebih aman. Selama pemberontakan DI/TII keamanan tidak menentu, antara kawan dan lawan tidak jelas, masyarakat saling curiga, beruntunlah gerombolan pimpinan Bang Jumali dapat di tumpas oleh masyarakat Pangasa atas bantuan TNI. Pada tahun 1955-an terjadi abrasi pantai kurang lebih 15 meter pertahun dan mengancam perkampungan serta seluruh tambak di sepanjang pantai Tongke-Tongke. Tahun 1960-1962 kondisi keamanan mulai membaik, sebagian masyarakat kembali ke Tongke-Tongke menata kampungnya setelah keamanan dianggap benar-benar pulih. Maka pemerintah membagi Tongke-Tongke menjadi dua Dusun yakni Dusun Tongke-Tongke dan Dusun maroanging. Perkembangan dan perubahan dari tahun ketahun mendorong pemerinatah untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga Pada tahun 1970 pemerintah bersama masyarakat sepakat untuk mendirikan sekolah dasar.(Tongke-togke, n.d.)

Tahun 1970 Tongke-Tongke dilanda kemarau panjang, akibatnya masyarakat kekurangan pangan dan terpaksa makan ubi kayu dan sagu untuk mempertahankan hidupnya. Disisi lain kondisi gelombang pasang air semakin tinggi hingga mencapai 30-40 cm bahkan sampai dikolom rumah penduduk dan tahun 1980-an, abrasi pantai sangat luar biasa mengakibatkan rumah penduduk banyak yang terancam bahkan ada beberapa rumah yang harus dipindahkan untuk menghindari bencana. Karena kondisi pemukiman yang setiap tahunnya terancam abrasi maka muncul ide dari kepala lingkungan yang saat itu di jabat oleh H. Badaruddin (almarhum) bersama dengan beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan penyelamatan pantai dengan cara mengumpulkan batu karang untuk dijadikan sebagai tanggul (talud). Batu karang tersebut di ambil dari Desa tetangga di sekitar pulau Sembilan, pengambilan batu karang di lakukan seminggu sekali usai sholat jumat. Pengumpulan batu karang tersebut dilakukan dengan penuh semangat demi menyelamatkan lingkungan mereka dari ancaman abrasi. Warga Tongke-Tongke ketika itu belum tahu kalau mengumpulkan batu karang dapat merusak biota laut. Ternyata upaya penyelamatan dengan pembuatan tanggul tidak berhasil, maka dilakukanlah penanaman bakau pada tahun 1980-an oleh penduduk yang umumnya berada di pesisir. Inisiatif tersebut muncul karena upaya perlindungan dengan batu karang tidak berhasil dan melihat lingkungan tetangga yang tidak kena abrasi, terhalang bakau. (Tongke-togke, n.d.)

Pengalaman tersebut telah mendorong penduduk Tongke-Tongke yang dimotori oleh H. Badaruddin sebgai kepala lingkungan bersama masyarakat bersepakat untuk melakukan penanaman bakau. Kegiatan penanaman bibit bakau ini berlangsung sampai tahun 1990, dan hasil penanaman tersebut tingkat pertumbuhanya cukup baik. Pada tahun 1991 terjadi musibah gempa bumi tektonik di pulau flores yang mengancam pemukiman penduduk, bencana tersebut tidak terlalu berdampak pada masyarakat Tongke-Tongke karena sebaaian rumah warga sudah terlindung oleh hutan bakau. Perkembangan lainnya yaitu pengaspalan jalan poros samataring ke pemukiman pesisir Tongke-Tongke, keberhasilan lainnya yang diterima masyarakat yaitu pengharagaan kalpataru yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia (H. M. Soeharto) pada tahun 1995 kepada bapak Muh. Tayyeb sebgai ketua kelompok ACI. Pada tahun 2002 sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1999 tentang Pemerintah Desa maka Tongke-Tongke yang dulunya merupakan lingkungan dari kelurahan samataring saat itu dijadikan

Desa persiapan dengan Kepala Desa sementara H. Alimuddin (Tongke-togke, n.d.) Desa Tongke-Tongke terdiri dari 5 Dusun yakni, Dusun Babana yang merupakan ibukota Desa, Maronging, Baccara, Bentengge dan Cempae. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2003 menjadi Desa definitive setelah tanggal 8 11 Februari tahun 2003 diadakan pemilihan kepala Desa dan memilih bapak Muh. Nasri Dg lanna sebagai kepala Desa pertama di Tongke-Tongke dan dilantik pada tanggal 21 maret 2003.

Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

Tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan masih jauh dari tingkat optimal dan berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya yang secara terus menerus dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih optimal. Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yakni Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sinjai Bapak Rusdianto (45) tahun, berikut hasil wawancara peneliti yang menanyakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Dalam wawancara mengungkapkan bahwa:

“Dalam hal mengelolah kawasan pesisir kami melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan, jadi dengan menyalurkan bantuan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan mengelolah pemasaran hasil perikanan. Serta mengeluarkan kebijakan terkait pelestarian hutan mangrove.” (Wawancara 12 September 2022)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa Dinas perikanan dan Kelautan berupaya dalam mengelolah kawasan pesisir dan laut. Hal ini selaras dengan hasil wawancara Kepala Desa Tongke-Tongke Bapak Sirajuddin (49) tahun, berikut hasil wawancara peneliti yang menanyakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Dalam wawancara mengungkapkan bahwa:

“Dalam program pemerintah yakni pengembangan perikanan tangkap berupa bantuan tali rampon dan sampan-sampan viber kepada masyarakat nelayan yang kurang mampu yang setiap tahun tersalurkan menurut saya itu adalah upaya pemerintah dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Dan kami juga dari pemerintah desa telah membuatkan tambatan-tambatan perahu untuk para nelayan. pelestarian hutan mangrove termasuk pula dalam aturan pemerintah namun masih saja terdapat beberapa masyarakat pesisir yang menebang mangrove untuk lahannya dijadikan pemukiman.” (Wawancara 24 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya pengelolan kawsan pesisir dan laut dengan adanya program pengembangan perikanan tangkap yang menyalurkan bantuan tali rampon dan sampan-sampan viber yang dapat membantu masyarakat nelayan di Desa Tongke-Tongke namun masyarakat setempat masih kurang sadar akan pentingnya mangrove dalam kehidupan kawasan pesisir. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan pernyataan berbeda di ungkapkan oleh salah satu informan yakni Ibu Suri Alami (43) yang suaminya bekerja sebagai nelayan di Desa Tongke-Tongke, berikut wawancara peneliti dengan informan yang menungkapkan:

“Upayanya pemerintah dalam mengelola kawasan pesisir ini masih sangat kurang saya rasakan, itupun ada bantuan tapi hanya sebagian kecil orang yang dapat dan tidak merata. Justru sekarang terdapat tambang pasir yang beroperasi disini yang membuat kami ini para nelayan kesusahan karena mereka mengambil pasir di tempat perahu yang pastinya akan berlubang dan perahu terperosot dilubang terus siapa nanti yang bertanggung jawab, sementara 1 perahu penongkol saja anggaran Rp. 400.000.000, dan itu semua tidak ada asuransinya. Baru tidak ada sama sekali upayanya pemerintah menanggapi hal ini jadi kalau bukan kami masyarakat yang bertindak maka tidak adami tindakan, kami sudah melapor sampai ke pengadilan tapi masih belum ada hasil yang kami dapat.” (Wawancara 5 Juli 2022)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dijelaskan bahwa pemerintah khususnya pemerintah daerah kurang memperhatikan kawasan pesisir dan laut di Desa Tongke-Tongke, ditambah lagi dengan masuknya tambang pasir di kawasan ini yang kemudian malah menyengsarakan kehidupan masyarakat nelayan pesisir yang sampai sekarang masih belum ada upaya untuk memperbaikinya. Pernyataan serupa yang juga di ungkapkan oleh Bapak Mustafa Lingga (51) tahun yang bekerja sebagai nelayan, berikut hasil wawancara dengan informan:

“Kalau berbicara tentang upaya pemerintah yang saya lihat ini masih kurang sentuhan dari pemerintah. Terlebih lagi semenjak ada tambang pasir yang merugikan masyarakat disini jadi banyak masyarakat yang tidak setuju karena pasir di pesisir pantai terkikis, sudah banyak juga pohon kelapa yang tumbang akibat pengerukan pasir ini, dan rumah warga yang hampir runtuh atau mau abrasi. Dulu-dulu itu sebelum adanya tambang pasir nah bagus sekali itu pasir naik sehingga menjadi daratan tapi sekalinya ada tambang pasir ini pasir tidak bisa lagi berkembang, jadi tambang pasir ini hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang banyak dan sampai sekarang itu tidak ada izin untuk tambang pasir atau illegal lah. Kemarin sempat di proses di pengadilan dan datang pemeriksaan tapi pada saat datang pemeriksaan tiba-tiba tambang pasir itu berhenti beroperasi terus mereka sembunyikan itu alat-alatnya lalu kemudian setelah pulang itu pemeriksa langsung beroperasi lagi. Jadi kami ini masyarakat disini meminta pemerintah agar menutup itu tambang pasir. (Wawancara 5 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa kurangnya upaya pengelolaan kawasan pesisir dan laut dari pemerintah, hal ini dibuktikan dari masuknya tambang pasir secara illegal yang mengganggu keberlangsungan mata pencaharian dan pemukiman masyarakat nelayan. Secara umum, aktivitas penambangan pasir laut menyebabkan air menjadi keruh. Ini karena lapisan pasir paling bawah adalah tanah yang berlumpur. Oleh karena itu, pada saat pengerukan mencapai dasar, maka akan menyebabkan air menjadi keruh. Kondisi tersebut membuat nelayan tidak dapat menangkap hasil laut di wilayah tersebut sejak dilakukan pengerukan. Nelayan kecil yang menangkap di daerah tersebut harus membalik haluan dan mencari tempat penangkapan lain di tempat yang lebih jauh. Hal ini diperkuat dengan wawancara kepada informan yang suaminya bekerja sebagai nelayan yakni Ibu Sinar (48) tahun, berikut hasil wawancara:

“Kami disini nelayan butuh sekali itu upayanya pemerintah, kami ini hanya nelayan kecil jadi kalau itu tambang pasir sedang beroperasi disuatu tempat yang disitu juga kami mau tangkap ikan terpaksa kami harus cari tempat yang jauh dan itu membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak juga.” (Wawancara 6 Juli 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sinar (48) tahun, mengungkapkan bahwa masyarakat nelayan pesisir dan laut sangat membutuhkan upaya pengelolaan dari pemerintah untuk dapat memperbaiki kembali ekosistem ikan sehingga mereka tidak perlu lagi mencari ikan ke tempat yang lebih jauh. Hal ini di karenakan adanya aktifitas dari tambang pasir yang secara tidak langsung dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat nelayan pesisir. Wawancara dengan Bapak Masdar (45) tahun yang berprofesi sebagai Guru Swasta, berikut hasil wawancara:

“Yang saya lihat pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai program dalam hal mengelolah kawasan pesisir namun hal tersebut tidak tersalurkan secara merata dan tingkat pengawasan dari pemerintah masih terbilang kurang. Kurangnya pengawasan ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat pesisir yang menebang hutan mangrove dan adanya penambangan pasir.” (Wawancara 13 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk mengelolah kawasan pesisir namun dalam hal ini pengawasan dari pemerintah masih kurang sehingga kurang tersalurkannya bantuan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir dan laut. Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yakni Ibu Jubaedah (53) tahun yang bekerja sebagai penjual ikan asap di Desa Tongke-Tongke. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Kurang saya lihat ini upayanya pemerintah, paling kita sendiri masyarakat disini yang berusaha menjaga kebersihan lingkungan disini seperi tidak membuang sampah di laut dan tidak buang air besar (BAB) di laut supaya laut tidak tercemar dengan limbah agar kami ini nelayan kecil bisa memancing di sekitar pesisir disini walaupun masih ada-ada saja segelintir orang yang masih membuang sampahnya di pinggir laut.” (Wawancara 8 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa dampak dari pengelolaan yang dirasakan itu dari peran masyarakat sendiri yang menjaga kebersihan ekosistem di kawasan pesisir sehingga masih memungkinkan untuk menangkap ikan di beberapa titik kawasan pesisir dan laut.

Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut pada umumnya masih memiliki kesadaran publik yang masih rendah. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, kurang banyak menyadari wewenang dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan pesisir dan laut. Kontribusi dan partisipasi masyarakat pesisir juga masih rendah sehingga upaya pengelolaan kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan bantuan pemerintah yang berupa tali rampon dan sampan-sampan viber tidak tersalurkan secara merata dan masih adanya masyarakat pesisir yang menebang hutan

mangrove. Selain itu, isu-isu pesisir dan kelauatan seperti adanya aktivitas tambang pasir yang tidak memiliki izin belum menjadi prioritas pemerintah maupun masyarakat umum.

Relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut terdapat hubungan yang kurang signifikan antara peran pemerintah dengan peran masyarakat dan berpengaruh terhadap pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir dan laut Desa Tongke-Tongke seperti keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antara pelaku pengelolaan, dan lemahnya penegakan hukum. Sehingga membuat pengelolaan kawasan pesisir dan laut masih kurang optimal baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin. (2022). *Metode Penelitian Sosial : Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif*. 6(1), 104–113.
- Basri, H. (2020). *Pengelolaan , Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia*. VIII(November), 1–27.
- Bengen, D. (2004). Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya. *Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, IPB: Bogor*.
- Dahuri, R., Rais J., Ginting S.P., dan Sitepu, M. . (2001). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradhya Paramita.
- Dahuri, R. (2001a). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>
- Dahuri, R. (2001b). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Volume XVII No. 2 April - Juni 2001 : 139 – 171., XVII*.
- Dahuri,R. (2003). Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danusaputro, M. (1985). Hukum Lingkungan. Jakarta: Binacipta, 70.
- Djojohadikusumo, S. (1994). Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Fauzi, I., & Rauf, A. (2021). *Kajian Perubahan Garis Pantai Dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Di Wilayah Pesisir Kecamatan Sinjai Timur , Kabupaten Sinjai (The Study of Coastal Change by Using Remote Sensing Technology in the Coastal Area of East Sinjai Sub-district Sinj. 4(1), 36–47*.
- Hajrah, A. (2016). Pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan bagi pengembangan kawasan pesisir di kecamatan galesong selatan kabupaten takalar. *Skripsi*.

- Huberman, M. dan. (1992). Analisis Data Kualitatif. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat. (1993). Metode-metode Penelitian Masyarakat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 29.
- Koentjaraningrat. (1997). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia. *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.
- Mohamad Soerjani, D. (1987). Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan. Jakarta: UI Press, 13.
- Moleong, L. . (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nikijuluw. (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Bogor: Jurnal Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan PKSPPL.
- Poernomosidhi. (2007). Kebijakan Pengelolaan Ruang Wilayah Kawasan Pesisir di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana. *Kebijakan Pengelolaan Ruang Wilayah Kawasan Pesisir Di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana, Materi Seminar Nasional : Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana*. Bandung.
- Purwanto, Y. (2000). *Kawasan Pesisir* : 117–134.
- Rochimin Dahuri, dkk. (1996). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta.
- Samad, M. S. dan B. (1993). Manusia dalam Kesenjangan Lingkungan. Jakarta: UI Press, 2.
- Suryadi. (2015). Pengelolaan lahan pesisir pantai dusun batulawang desa kemujan kecamatan karimunjawa skripsi. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, xiv,70. <http://lib.unnes.ac.id/20672/1/7101410037-s.pdf>
- Suryani, A. S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Benoa Badung Bali Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 171–187.
- Tjiptabudy, J. (2013). Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat. *Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat*. Ambon: Jurnal Universitas Pattimura.
- Tongke-tongke, pemerintah desa. (n.d.). *Profil desa tongke-tongke*.

Witomo, C. M. (2019). Pengelolaan wilayah pesisir dengan pendekatan instrumen ekonomi: Sebuah review teori dan peluang aplikasi. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5(1), 39–52.

Wiyana. (2004). Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T). *Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPs 702)*. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.